



COMPANY  
LOGO

# RENCANA KERJA ( RENJA )

DINAS KOMUNIKASI &  
INFORMATIKA  
KAB. FLORES TIMUR



TAHUN 2024

25

Mbps  
unlimited GB

50

Mbps  
unlimited GB

100

Mbps  
unlimited GB



NOMOR TELEPON



EMAIL



SITUS WEB

[www.diskominfo](http://www.diskominfo)

[florestimurkab.go.id](http://florestimurkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 telah diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini merupakan dokumen yang memuat pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Komunikasi dan Informatika untuk Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan dan Program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dan untuk mereview hasil pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 dan perkiraan realisasi capaian tahun berjalan (Tahun 2023). Rencana Kerja (Renja) termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dapat terukur dan berorientasi pada hasil yang berujung pada meningkatnya kualitas Pembangunan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Flores Timur.

Larantuka, Juli 2023  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Flores Timur,



**Heronimus Lamayuran/Herry, S.Sos**

Pembina Utama Muda

NIP. 197205111992011001

## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERATURAN BUPATI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	5
<b>BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....</b>	<b>6</b>
2.1 EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH .....	6
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	16
2.3 ISU-ISU STRATEGIS DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN FLORES TIMUR.....	17
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .....	17
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	23
<b>BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>26</b>
3.1 TELAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	26
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH .....	26
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN .....	27
<b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>31</b>
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>35</b>

## DAFTAR TABEL

	Hal.
<b>Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur.....</b>	<b>6</b>
<b>Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur .....</b>	<b>16</b>
<b>Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 .....</b>	<b>17</b>
<b>Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur .....</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024.....</b>	<b>27</b>
<b>Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 .....</b>	<b>28</b>
<b>Tabel 4.1 Rencana kerja dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur .....</b>	<b>31</b>



SALINAN

BUPATI FLORES TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagi unsur penunjang perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD, yang memuat Program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD Tahun 2024.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
  - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
  - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
  - e. BAB V : Penutup
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun RKA PD.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2024.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPPD.
- (3) Kepala BPPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2024 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2024.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 17 Juli 2023  
PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka  
pada tanggal 17 Juli 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK.I  
NIP.19780426 200212 1 007

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektoral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Tahun 2024, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Renja PD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023.

Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substansial*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi, (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja PD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 merupakan penjabaran Tahun Kedua Renstra PD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026, untuk periode1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Renja PD Tahun 2024 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah.

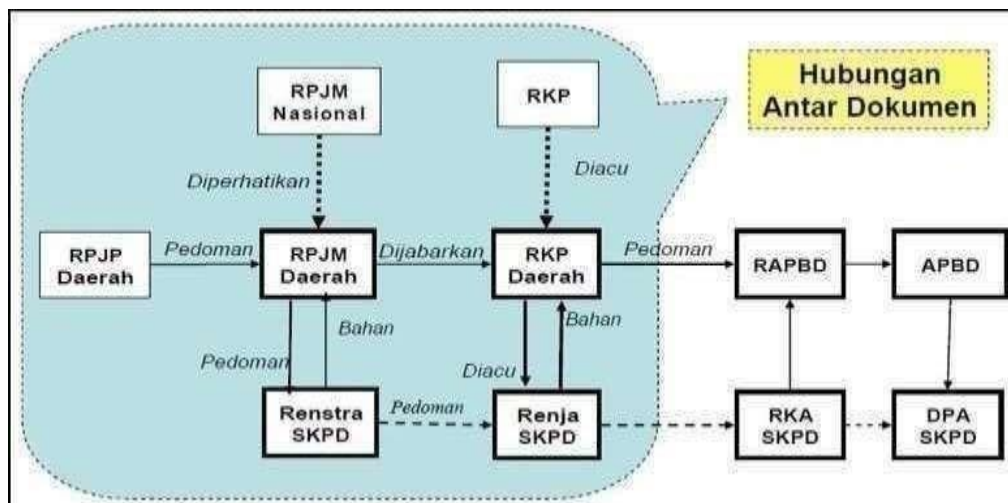
Renja PD Tahun 2024 disusun berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Berdasarkan ketentuan tersebut tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan penyusunan; orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi pembangunan Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal; dilakukan berdasarkan Renstra PD dan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2023.
3. Penyusunan Rancangan; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Bupati Flores Timur Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Renja PD.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; dilakukan dengan pembahasan rancangan Renja PD bersama pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan Renja PD berdasarkan hasil musrenbang dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
6. Penetapan; dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi rancangan akhir Renja PD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Flores Timur. Hasil penajaman program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja PD berdasarkan rekomendasi Bappelitbangda, selanjutnya diusulkan untuk penetapan Renja PD dengan Peraturan Bupati. Sebagaimana telah diuraikan diatas Renja PD Tahun 2024 disusun berdasarkan
7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Selanjutnya Renja PD Tahun 2024 menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024. Hubungan Renja PD dengan Dokumen perencanaan lainnya dan Dokumen anggaran sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

**Gambar 1.1**

**Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah**



## 1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 mengacu pada Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 73 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur;
13. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
15. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud penyusunan RENJA Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2024 yang merupakan penjabaran RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten

Flores Timur Tahun 2023-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

## 2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

### 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RENJA.

#### **Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja Perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

#### **Bab III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

#### **Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2024 serta Prakiraan Maju Tahun 2025.

#### **Bab V. Penutup**

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyusunan dokumen Renja Tahun 2024 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Lalu sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur

Kode Rekening	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Keg	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) sampai akhir periode (2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program & Keg s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= 5+7 +9	10=10 /4*100
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	78	100	212	96			
		Tersedianya Sarana dan	100	65	100	109	98			

		Prasarana Aparatur								
		Jumlah aparaturnya yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA (orang)	0	2	0	0	0			
		Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja keuangan OPD (Dok)	50	40	7	7	100			
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		50	40	7	7	100			
2.16.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dok)	50	40	7	7	100			
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0	0	0	0	95			
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	60	48	14	14	95			
2.16.01.2.02.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)	50	40	12	12	100			
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0	0	0	0			
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan	0	0	0	0	0			

	Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi	Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	0	0	0	100			
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerang bangunan kantor (komponen)	60	48	5	5	100			
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (Unit)	20	16	0	0	0			
		Tersedianya peralatan gedung kantor (unt)	22	11	0	0	0			
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor (jenis)	60	24	20	20	100			
		Tersedianya ATK (Jenis)	60	48	25	25	100			
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	TersedianyaB arang Cetak dan Penggandaan (lembar)	70640	15000	2500	34563	138,30			
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (jenis)	60	48	1	2	200			
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu (dos)	1030	1540	200	200	100			
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ( kali )	60	48	70	70	100			
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah		0	0						

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2.16.01.2. 07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas/opresio nal (Unit)	0	0	0	0	0			
2.16.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah									
2.16.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat (bulan)	60	48	12	12	100			
2.16.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	60	48	12	12	100			
2.16.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)	60	48	17	17	100			
2.16.01.2. 09	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah									
2.16.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas operasional (unit)	20	4	4	4	100			
		Terlaksananya pemeliharaan unit kendaraan dinas	7	7	1	4	400			

		operasional (Unit)								
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor (gedung)	10	8	2	2	100			
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/berkala perlengkapan gedung kantor (gedung)	60	36	6	3	50			
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Layanan Informasi	250 Buku, 29 OPD, 200 Peserta	250 Buku, 29 OPD, 200 Peserta	250 Buku, 29 OPD, 200 Peserta	0	0			
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Layanan Informasi								
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (peserta)	95	0	19	19	100			
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Optimalisasi Peran RSPD (Kec)	21600	9360	19	19	100			
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah (Kec)	95	38	19	19	100			
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah desa yang dibina menjadi desa digital (Desa)	95	0	8	8	100			

2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan pengembang an komunikasi, informatika media massa(%)	19 Komso sdes, 4320 Jam, Websit e daerah di 3 OPD, SMS centre didang ate way 20 Sekola h, 5 Puskes mas, Websit e Daerah di 30 Desa	19 Koms osdes , 4320 Jam, Webs ite daera h di 3 OPD, SMS centr e didan gate way 20 Sekol ah, 5 Pusk esmas, Webs ite Daera h di 30 Desa	19 Koms osde s, 4320 Jam , Web site daer ah di 3 OP D, SM S cent re dida ngat e way 20 Sek olah , 5 Pus kes mas , Web site Dae rah di 30 Des a	5 Koms osdes , 1560 Jam, Websi te daera h di 16 OPD, SMS centre didan gate way 30 Sekol ah, 6 Puske smas, Websi te Daera h di 21 Desa	5 Koms osdes , 1560 Jam, Websi te daera h di 16 OPD, SMS centr e didan gate way 30 Sekol ah, 6 Puske smas, Websi te Daera h di 21 Desa			
		Tersedianya tenaga IT tingkat Kabupaten(%)	0	0	20	0	0			
2.16.03.2. 01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota									

2.16.03.2. 01.02	Penatalaksa naan dan Pengawasa n Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelengg araan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Revitalisasi Website pemerintah daerah (bulan)	60	48	19	19	100			
2.16.03.2. 01.03	Penyelengg araan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Koordinasi pembanguana n tower telekomunikas i pada blank spot (paket)	100	0	19	19	100			
2.16.03.2. 02	Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota									
2.16.03.2. 02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah an Daerah	Tersedianya pusat data pemerintah daerah (kec)	19	0	19	19	100			
2.16.03.2. 02.10	Pengemb angan dan pengelolaan teknologi daya informasi dan komunikasi pemrintah daerah	SDM dalam bidang komunikasi dan informasi (admin web OPD)yang dilatih	19	0	100	100	100			

Kode Rekening	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Keg	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) sampai akhir periode (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program & Keg s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	10=10/4*100
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %					100 %	100 %	100
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %					100 %	100 %	100
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	100 %					100 %	100 %	100
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %					100 %	100 %	100
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8					2 Dokumen	2	25
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6					0 Dokumen	0	0
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15					6 Laporan	6	40
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16					4 Laporan	4	25
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14					14 Orang/bulan	14	100
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36					0 Dokumen	0	0
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12					12 Dokumen	12	100
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	48					12 Laporan	12	25
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
2.16.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3					0 Dokumen	0	0
2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18					0 Laporan	0	0

2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18				0 Laporan	0	0
<b>2.16.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	38				2 Dokumen	2	5
2.16.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	36				0 Dokumen	0	0
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9				0 Orang	0	0
<b>2.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4				1 Paket	1	25
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4				1 Paket	1	25
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4				1 Paket	1	25
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4				1 Paket	1	25
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4				1 Paket	1	25
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	8				2 Dokumen	2	25
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48				12 Laporan	12	25
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48				12 Laporan	12	25
2.16.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3				0 Dokumen	0	0
2.16.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36				0 Dokumen	0	0
<b>2.16.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3				0 Unit	0	0
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5				1 Unit	1	20
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6				1 Unit	1	17
2.16.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1				0 Unit	0	0
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3				0 Unit	0	0
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2				0 Unit	0	0

2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48				12 Laporan	12	25
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48				12 Laporan	12	25
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1				1 Laporan	1	100
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48				12 Laporan	12	25
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4				4 Unit	4	100
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2				0 Unit	0	0
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40				10 Unit	10	25
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2				2 Unit	2	100
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8				2 Unit	2	25
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan layanan media komunikasi dan Informasi publik	41 %				40 %	40 %	98
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	4				1 Dokumen	1	25
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	144				24 Dokumen	24	17
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	120				30 Dokumen	30	25
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	487				1,18 Dokumen	118	24
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	2992				493 Dokumen	493	16
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	112				28 Layanan	28	25
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	80				20 Orang	20	25

2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	44					11 Dokumen	11	25
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4					1 Unit	1	25
2.16.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah</b>	<b>100</b>					<b>76,22 %</b>	<b>76,22</b>	76
2.16.03.2.01	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>									
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	200					50 Domain	50	25
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80					20 Dokumen	20	25
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	120					30 Unit	30	25
2.16.03.2.02	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>									
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1					1 Unit	1	100
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4					1 Dokumen	1	25
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	16					4 Dokumen	4	25

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisi
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	2025	
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		V	131:58:	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan hanya dilaksanakan di tahun 2022

2	Presentase Lembaga yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Pemda		V	18	20	20	20	32	0	20	20	Kegiatan hanya dilaksanakan di tahun 2023
3	Cakupan layanan Telekomunikasi		V	0	76.22	72.22	72.22	0	0	72.22	72.22	Kegiatan hanya dilaksanakan di tahun 2023

Berdasarkan Capaian Pelayanan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur terdapat 3 (tiga) Indikator Pelayanan Kinerja yang Mendukung Pencapaian Kinerja, pada Presentase lembaga yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Pemda Mencapai 32 % atau sekitar 16 OPD dari target 18 %

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Flores Timur tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk sikap responsif terhadap perkembangan kebijakan pemerintah pusat (Kementerian Komunikasi dan Informatika) maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur) Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi menjadi kunci keberhasilan Pembangunan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dalam perumusan perencanaan kerja dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Flores Timur dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya juga, menghadapi banyak Permasalahan baik yang datang dari dalam maupun dari luar di antaranya :

1. Pembangunan Jaringan Internet yang belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan public belum optimal

Berdasarkan permasalahan yang datang dari luar dan dari dalam yang menghambat keberhasilan pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika , maka isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, Empat tahun ke depan, adalah :

1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Website oleh Oraganisasi Perangkat Daerah
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan Akses Informasi dan Teknologi
3. Masih rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional khususnya yang menguasai bidang IT

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur 2024 adalah sebagaimana yang tersaji pada tabel 2.4 Sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024  
Kabupaten Flores Timur

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN FLORES TIMUR											
No.	RANCANGAN RKPD AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	
1		3	4	5	6		8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2,410,323,822	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2,227,994,734	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun (Dok)	2	10,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun (Dok)	2	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	OPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKP SKPD	2	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	OPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKP SKPD	2	9,397,222	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang disusun (Dok)	3	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang disusun (Dok)	3	5,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OPD	Jumlah Evaluasi Kinerja PD yang disusun (Dok)	4	5,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OPD	Jumlah Evaluasi Kinerja PD yang disusun (Dok)	4	5,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	1,883,323,822	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	OPD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	1,745,397,512	

			( Bulan )			ASN		( Bulan )			
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD( Bulan )	12	10,000,000	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD( Bulan )	12	66,200,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD(DOK)	12	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD(DOK)	12	10,000,000	
	<b>Admistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (dok)			<b>Admistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (dok)	100%		
	Penyusunan barang milik daerah SKPD	OPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	10,000,000	Penyusunan barang milik daerah SKPD	OPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
	Rekonsolidasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	OPD	Jumlah Laporan Rekonsolidasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	5,000,000	Rekonsolidasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	OPD	Jumlah Laporan Rekonsolidasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	5,000,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	OPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	6	5,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	OPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD			
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)</b>	100%		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)</b>	100%		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	OPD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian( Dokumen)	12	5,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	OPD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian( Dokumen)			
	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	OPD	Jumlah Dokumen Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12	5,000,000	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	OPD	Jumlah Dokumen Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12	5,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	OPD	Jumlah Pegawai berdsarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3	5,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	OPD	Jumlah Pegawai berdsarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</b>	100%		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</b>	100%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OPD	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan(Paket)	1	2,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OPD	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan(Paket)	1	1,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	1	10,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	1	5,000,000	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	OPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan(Paket)	1	5,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	OPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan(Paket)	1	4,000,000	
	Penyediaan bahan logistic	OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)	1	23,000,000	Penyediaan bahan logistik	OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)	1	15,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(paket)	1	10,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(paket)	1	10,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(dokumen)	2	2,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(dokumen)	2	2,000,000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	OPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)	12	15,000,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	OPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)	12	1,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(laporan)	12	40,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(laporan)	12	40,000,000	
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	OPD	Jumlah dokumen penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	1	5,000,000	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	OPD	Jumlah dokumen penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	1	5,000,000	
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	OPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12	5,000,000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	OPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12	5,000,000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>		
	Pengadaan Kendaraan dinas operasional / lapangan	OPD	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1	25,000,000	Pengadaan Kendaraan dinas operasional / lapangan	OPD	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1	25,000,000	
	Pengadaan Mebel	OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)	2	10,000,000	Pengadaan Mebel	OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)	2	10,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan(Unit)	3	20,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan(Unit)	2	20,000,000	
	Pengadaan Aset tak berwujud	OPD	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	1	5,000,000	Pengadaan Aset tak berwujud	OPD	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan			
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya	OPD	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya yang disediakan	1	5,000,000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya	OPD	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya yang disediakan	2	5,000,000	
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	OPD	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	5,000,000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	OPD	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2	5,000,000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase tersedianya jasa penunjang	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase tersedianya jasa penunjang	100%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan ( Laporan )	12	1,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan ( Laporan )	12	1,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik yang disediakan (Laporan)	12	45,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik yang disediakan (Laporan)	12	45,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)	10	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)	0	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OPD	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ( Laporan )	12	144,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OPD	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ( Laporan )	12	108,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	45,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	45,000,000	
	Pemeliharaan Meubel	OPD	Jumlah meubel yang di pelihara	2	5,000,000	Pemeliharaan Meubel	OPD	Jumlah meubel yang di pelihara	2	5,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	5,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	5,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	15,000,000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	5,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi ( Unit )	2	5,000,000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi ( Unit )	2	5,000,000	
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik		Cakupan Layanan Media Komunikasi dan Informasi Publik ( % )	40	185,491,310	Program Informasi dan Komunikasi Publik		Cakupan Layanan Media Komunikasi dan Informasi Publik ( % )	40	147,250,000	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Informasi dan Komunikasi Publik	1,737		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Informasi dan Komunikasi Publik			

	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Larantuka	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik ( Dokumen )	1	7,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Larantuka	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik ( Dokumen )	1	7,000,000	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	19 Kec	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik( dokumen)	36	25,000,000	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	19 Kec	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik( dokumen)	36	25,000,000	
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	19 Kec	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik ( Dokumen )	30	10,000,000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	19 Kec	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik ( Dokumen )	30	10,000,000	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	19 Kec	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	123	48,491,310	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	19 Kec	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	123	20,000,000	
	Pelayanan Informasi Publik	19 Kec	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik(Dokumen)	833	25,000,000	Pelayanan Informasi Publik	19 Kec	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik(Dokumen)	833	20,000,000	
	Layanan Hubungan Media	19 Kec	Jumlah layanan hubungan media ( Layanan )	28	20,000,000	Layanan Hubungan Media	19 Kec	Jumlah layanan hubungan media ( Layanan )	28	15,250,000	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Larantuka	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya ( Orang )	20	20,000,000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Larantuka	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya ( Orang )	20	20,000,000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	19 Kec	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi kan Informasi Program atau Kebijakan melalui Kolompok Informasi Masyarakat(do kumen)	11	20,000,000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	19 Kec	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi kan Informasi Program atau Kebijakan melalui Kolompok Informasi Masyarakat(do kumen)	11	20,000,000	
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Paket )	1	10,000,000	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Paket )	1	10,000,000	
3	Program Aplikasi Informatika		Prosentase Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah	72,22%	222,494,782	Program Aplikasi Informatika		Prosentase Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah	84,42%	177,500,000	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Domain)	70		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Domain)			

	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa	19 Kec	Jumlah pendaftaran nama domain Pemerintah Kabupaten/Kota (Domain)	50	10,000,000	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa	19 Kec	Jumlah pendaftaran nama domain Pemerintah Kabupaten/Kota (Domain)	50	10,250,000	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19 Kec	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	21	100,000,000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19 Kec	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	20	100,000,000	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	19 Kec	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)	30	50,000,000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	19 Kec	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)	30	25,000,000	
	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Pusat Layanan Publik dan Administrasi (Unit)	1		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Pusat Layanan Publik dan Administrasi (Unit)			
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Larantuka	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola (Unit)	1	20,000,000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Larantuka	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola (Unit)	0	-	
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Jaringan Intra Pemerintah Daerah	19 Kec	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	22,494,782	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Jaringan Intra Pemerintah Daerah	19 Kec	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	22,250,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Larantuka	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	4	20,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Larantuka	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	4	20,000,000	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/Kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencana bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat maupun dari prangkat daerah kabupaten/kota maupun dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada prangkat daerah.

Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggara tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan Musrenbang Kecamatan dari awal bulan Maret sampai dengan awal bulan April Tahun 2023 dengan lingkup 19 Kecamatan dan telah

dilakukan forum OPD dan dilanjutkan dengan forum konsultasi publik Tahun 2023.

Rekapitulasi Musrenbang Kecamatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

**Tabel 2.5 (TC.32)**

**Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024**

**Kabupaten Flores Timur**

**Dinas Komunikasi dan Informatika**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A	<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
1	<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>		<b>Cakupan Layanan Media Komunikasi dan Informasi Publik ( % )</b>	<b>40</b>	
	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Dokumen Informasi dan Komunikasi Publik</b>		
	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Larantuka	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik ( Dokumen )	1	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	19 Kec	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik( dokumen)	24	
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	19 Kec	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik ( Dokumen )	30	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	19 Kec	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	123	
	Pelayanan Informasi Publik	19 Kec	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik(Dokumen)	833	
	Layanan Hubungan Media	19 Kec	Jumlah layanan hubungan media ( Layanan )	28	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Larantuka	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya ( Orang )	20	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	19 Kec	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan melalui Kolompok Informasi Masyarakat(dokumen)	11	

	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Paket )	1	
2	<b>Program Aplikasi Informatika</b>		<b>Prosentase Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah</b>	<b>84,42%</b>	
	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Domain)</b>		
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa	19 Kec	Jumlah pendaftaran nama domain Pemerintah Kabupaten/Kota ( Domain )	50	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19 Kec	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.(Dokumen)	20	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	19 Kec	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah(Unit)	30	
	<b>Pengelolaan e_government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Pusat Layanan Publik dan Administrasi (Unit)		
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Larantuka	<i>Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola(Unit)</i>	1	
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Jaringan Intra Pemerintah Daerah	19 Kec	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	1	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sitem Keamanan Informasi	Larantuka	<i>Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi</i>	4	

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan Daerah dan Nasional, serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN, Pemerintah telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi pelaksanaan pembangunan yang mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Untuk mendukung 5 (lima) arahan pemerintah tersebut dan memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan Nasional Tahun 2024, Pemerintah menetapkan tema RKP Tahun 2024 yaitu ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 tersebut, maka pembangunan Nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan. Salah satu prioritas nasional yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika yakni PN 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik.

### **3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-
			2021	2024
Terwujudnya Daya Saing Daerah	Terwujudnya Daya Saing Infrastruktur	Prosentase Jaringan Intra Pemerintah	68,04	84,43
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Persentase OPD yang terhubung dengan website pemda (%)	18	20

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Tema RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yakni: “Percepatan Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas”, dengan fokus pada 4 (empat) Prioritas pembangunan. Untuk mencapai sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan tersebut, dilaksanakan melalui program-program prioritas dengan indikator dan target kinerja sebagaimana terlihat pada Tabel berikut;

PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
4. Tata Kelola Pemerintahan	4.2 Meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Publik	Persentase jaringan intra pemerintah (%)	84,43
		Persentase OPD yang terhubung dengan website pemda (%)	20

### 3.3 Program Dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat Daerah Tahun 2024 tersebut, maka dirumuskan program dan kegiatan Prioritas Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan

Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Flores Timur

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN FLORES TIMUR**

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator  Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>								
2 16 02	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Media Komunikasi dan Informasi Publik ( % )		40	147,250,000			40	165,055,410
2 16 02 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	<b>Jumlah Dokumen Informasi dan Komunikasi Publik</b>							
2 16 02 2.0 1 01	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik ( Dokumen )	Larantuka	1	7,000,000	APBD II		1	7,000,000
2 16 02 2.0 1 02	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik( dokumen)	19 Kec	36	25,000,000	APBD II		36	25,000,000
2 16 02 2.0 1 04	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik ( Dokumen )	19 Kec	30	10,000,000	APBD II		30	11,055,410
2 16 02 2.0 1 05	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	19 Kec	123	20,000,000	APBD II		123	50,000,000
2 16 02 2.0 1 06	Layanan Hubungan Media	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik(Dokumen)	19 Kec	833	20,000,000	APBD II		0	0

2	16	02	2.0 1	07	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah layanan hubungan media ( Layanan )	19 Kec	28	15,250,000	APBD II		28	22,000,000
2	16	02	2.0 1	10	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya ( Orang )	Larantuka	20	20,000,000	APBD II		20	20,000,000
2	16	02	2.0 1	12	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan melalui Kelompok Informasi Masyarakat(dokumen)	19 Kec	11	20,000,000	APBD II		11	20,000,000
2	16	02	2.0 1	13	<b>Program Aplikasi Informatika</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Paket )	Larantuka	1	10,000,000	APBD II		1	10,000,000
2	16	02			<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah</b>		84,42 %	177,500,000			93%	206,193,251
2	16	03	2.0 1		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa	<b>Jumlah Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Domain)</b>							
2	16	03	2.0 1	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendaftaran nama domain Pemerintah Kabupaten/Kota ( Domain )	19 Kec	50	10,250,000	APBD II		50	10,193,251

2	16	03	2.0 1	02	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.(Dokumen)	19 Kec	20	100,000,000	APBD II	20	100,000,000
2	16	03	2.0 1	03	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah(Unit)	19 Kec	30	25,000,000	APBD II	30	52,000,000
2	16	03	2.0 2		Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Layanan Publik dan Administrasi (Unit)						
2	16	03	2.0 2	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola(Unit)</i>	Larantuka	1		APBD II		
2	16	03	2.0 2	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Sitem Keamanan Informasi	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	19 Kec	1	22,250,000	APBD II	1	24,000,000
2	16	03	2.0 2	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sitem Keamanan Informasi	<i>Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi</i>	Larantuka	4	20,000,000	APBD II	4	20,000,000
JUMLAH									324,750,000			371,248,661

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan pada Daerah. Maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan Daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III, dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024  
dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET JKINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024			PRIORITAS		PERKIRAAN TAHUN 2025	
							TARGET	PAGU INDIKATIF	LOKASI	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2,232,994,734				100%	2,319,323,822
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100%					100%	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun (Dok)	2	10,000,000	OPD		PD	2	5,000,000
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKP SKPD	2	9,397,222	OPD		PD	2	5,000,000
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang disusun (Dok)	3	5,000,000	OPD		PD	3	5,000,000
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja PD yang disusun (Dok)	4	5,000,000	OPD		PD	4	5,000,000
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100%					100%	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN ( Bulan )	14	1,745,397,512	OPD		PD	14	1,883,323,822
2	16	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD( Bulan )	12	66,200,000	OPD		PD	12	10,000,000
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD(DOK)	12	10,000,000	OPD		PD	12	5,000,000
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (dok)							

2	16	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
2	16	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	5,000,000	OPD		PD	6	5,000,000
2	16	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD							
2	16	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)</b>	<b>100%</b>				PD	<b>100%</b>	
2	16	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian(Dokumen)							
2	16	01	2.05	05	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12	5,000,000	OPD		PD	12	5,000,000
2	16	01	2.05	08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan							
2	16	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>				PD	<b>100%</b>	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan(Paket)	1	1,000,000	OPD			1	2,000,000
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	1	5,000,000	OPD		PD	1	5,000,000
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan(Paket)	1	4,000,000	OPD		PD	1	5,000,000
2	16	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)	1	15,000,000	OPD			1	13,000,000
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(paket)	1	10,000,000	OPD		PD	1	5,000,000
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(dokumen)	2	2,000,000	OPD		PD	0	0
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)	12	1,000,000	OPD		PD	12	10,000,000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(laporan)	12	40,000,000	Dalam dan Luar Daerah		PD	12	30,000,000
2	16	01	2.06	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	1	5,000,000	OPD		PD	1	5,000,000
2	16	01	2.06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12	5,000,000	OPD		PD	12	5,000,000
2	16	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	

2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan dinas operasional / lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1	25,000,000	OPD		PD	1	25,000,000
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)	2	10,000,000	OPD		PD	1	5,000,000
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan(Unit)	2	20,000,000	OPD		PD	1	5,000,000
2	16	01	2.07	08	Pengadaan Aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan							
2	16	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya yang disediakan	2	5,000,000	OPD			1	5,000,000
2	16	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2	5,000,000	OPD		PD	2	5,000,000
2	16	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase tersedianya jasa penunjang</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan ( Laporan )	12	1,000,000	OPD			12	1,000,000
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik yang disediakan(Laporan)	12	45,000,000	OPD		PD	12	45,000,000
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ( Laporan)	12	108,000,000	OPD		PD	12	144,000,000
2	16	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>	
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	45,000,000	OPD		PD	4	45,000,000
2	16	01	2.09	05	Pemeliharaan Meubel	Jumlah meubel yang di pelihara	2	5,000,000	OPD		PD	0	0
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)	10	5,000,000	OPD		PD	10	5,000,000
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	5,000,000	OPD		PD	2	16,000,000
2	16	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi ( Unit )	2	5,000,000	OPD		PD	2	10,000,000
2	16	02			<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>Cakupan Layanan Media Komunikasi dan Informasi Publik ( % )</b>	<b>40</b>	<b>147,250,000</b>				<b>40</b>	<b>165,055,410</b>
2	16	02	2.01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Informasi dan Komunikasi Publik</b>							
2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik ( Dokumen )	1	7,000,000	Larantuka		PD	1	7,000,000
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik( dokumen)	36	25,000,000	19 Kec		PD	36	25,000,000

2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik ( Dokumen )	30	10,000,000	19 Kec	PD	30	11,055,410
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	123	20,000,000	19 Kec	PD	123	50,000,000
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik(Dokumen)	833	20,000,000	19 Kec	PD	0	0
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media ( Layanan )	28	15,250,000	19 Kec	PD	28	22,000,000
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya ( Orang )	20	20,000,000	Larantuka	PD	20	20,000,000
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan melalui Kolompok Informasi Masyarakat(dokumen)	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan melalui Kolompok Informasi Masyarakat(dokumen)	11	20,000,000	19 Kec	PD	11	20,000,000
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Paket )	1	10,000,000	Larantuka	PD	1	10,000,000
2	16	02			<b>Program Aplikasi Informatika</b>	<b>Prosentase Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah</b>	<b>84,42%</b>	<b>177,500,000</b>			<b>93%</b>	<b>206,193,251</b>
2	16	03	2.01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Domain)</b>						
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa	Jumlah pendaftaran nama domain Pemerintah Kabupaten/Kota ( Domain )	50	10,250,000	19 Kec	PD	50	10,193,251
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	20	100,000,000	19 Kec	PD	20	100,000,000
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah(Unit)	30	25,000,000	19 Kec	PD	30	52,000,000
2	16	03	2.02		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pusat Layanan Publik dan Administrasi (Unit)</b>						
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola(Unit)</i>	1					
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	1	22,250,000	19 Kec	PD	1	24,000,000
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sitem Keamanan Informasi	<i>Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</i>	4	20,000,000	Larantuka	PD	4	20,000,000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

RENJA Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Dinas Komunnukasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupu nantinya Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan program kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangkainvestasi pembangunan dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar-program, dalam satu instansi dan antar-instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RENJA Tahun 2024 melalui pelaksanaan program, Dinas Komunnukasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RENJA Tahun 2023 sebagai berikut:

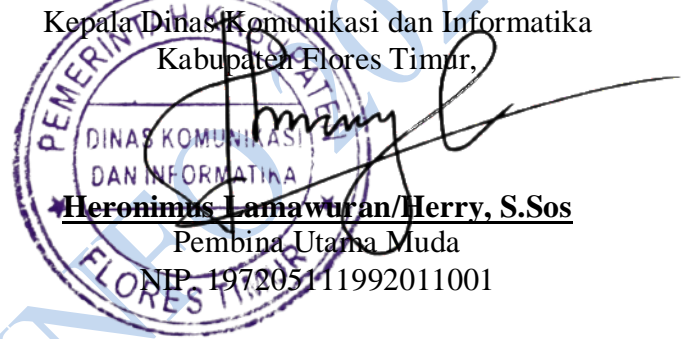
1. Semua *stakeholders* yang berkepentingan dalam pembangunan daerah Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Flores Timur berkewajiban untuk menjadikan RENJA Tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunannya, terutama yang berkaitan prioritas pembangunan dengan sasaran dan target kinerja yang sudah termuat dalam RENJA;
2. Dinas Komunnukasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik baik triwulan, semesteran maupun akhir tahun yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan, dan kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang termuat dalam Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKA ) Tahun 2024.
3. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Dinas Komunnukasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, selanjutnya tidak dapat keluar dari

kerangka acuan yang telah ditetapkan di dalam RENJA ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang tidak sempat termuat dalam RENJA Tahun 2024 ini.

Demikian RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah tahunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah.

Larantuka, Juli 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Flores Timur,



Heronimus Lamawuran/Herry, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 197205111992011001

RENJA KOMIN